

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**

Kepentingan nasional suatu negara merupakan agenda yang harus dicapai oleh negara tersebut. Kepentingan nasional suatu negara dapat dicapai di dalam wilayah negara dan juga di luar wilayah negara tersebut. Dalam mencapai kepentingan nasional yang hanya bisa dicapai di luar negara tersebut harus menggunakan instrumen khusus yaitu menggunakan instrumen kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan cerminan dari kondisi di dalam negeri dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Hal ini juga terlihat jelas pada penerapan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi dunia internasional untuk memenuhi kepentingan nasional Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan nasional Amerika Serikat yaitu untuk melindungi wilayah, warga negara, pendapatan dan sekutu Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu dinamis tergantung pada pembuatan kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Aktor-aktor pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat antara lain adalah kongres dan presiden, dan ada pula badan pendukung yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keputusan kebijakan luar negeri seperti CIA, departemen luar negeri, departemen pertahanan dan kekuatan militer.

---

<sup>1</sup> Windiani, Reni. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*. Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. (dapat diakses pada: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4894/4438>)

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan masalah yang serius sehingga tidak dapat diputuskan oleh satu pihak saja. Sehingga setiap aktor ini memiliki peran dan pengaruh masing-masing dalam dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mana akan dibahas lebih komprehensif dalam bab ini.

## **A. Aktor-aktor Pembuat Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Bidang Militer**

### **1. Presiden**

Menurut Bambang Cipto dalam bukunya yang berjudul *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat* (2007), dijelaskan bahwa Presiden adalah salah satu aktor utama politik luar negeri Amerika Serikat. Pada masa isolasionis kekuasaan presiden dalam bidang luar negeri sangat dibatasi oleh kongres. Sebagaimana tidak mudah bagi presiden Amerika Serikat untuk memberikan bantuan militer kepada negara lain kecuali telah mendapatkan dukungan dari kongres.

Kekuasaan presiden dalam politik luar negeri sesudah perang dunia II, pada dasarnya jauh lebih besar karena konflik Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Membuat kongres lebih longgar dalam mengawasi perilaku politik luar negeri presiden. Meski begitu, pada dasarnya presiden tidak sepenuhnya mandiri dalam menjalankan politik luar negeri Amerika Serikat. Kongres setiap saat dapat menghentikan kebijakan presiden bila kongres menganggap kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan Amerika.

Sepanjang perang dingin yang berlangsung antara tahun 1948 hingga 1990 kekuasaan presiden Amerika dalam proses pembuatan politik luar negeri cenderung dominan. Sekalipun demikian, dominasi presiden dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mengalami beberapa fase perubahan. Antara tahun 1948 hingga pertengahan dekade 60-an kekuasaan presiden Amerika nyaris sangat besar dalam bidang luar negeri. periode ini merupakan puncak dari era perang dingin. Persepsi tentang besarnya ancaman Soviet yang berhasil dibangun presiden-presiden Amerika pada

periode puncak perang dingin ini membuat oposisi terhadap kecenderungan menguatnya kekuasaan presiden menjadi lemah dan tidak sanggup menahan gejala pemekaran dominasi presiden dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Dalam periode ini kekuasaan presiden Amerika Serikat semakin mendominasi ditandai dengan meluasnya birokrasi politik luar negeri. Kongres yang pada awal perang dunia kedua masih memegang kendali dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dalam periode puncak perang dingin ini lebih memberikan wewenang kepada presiden Amerika Serikat dalam sebagian prakarsa-prakarsa politik luar negeri. Namun, kegagalan amerika dalam perang Vietnam dan skandal Watergate yang melibatkan presiden Nixon mengakibatkan berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap kekuasaan presiden yang sedemikian besar dan nyaris tak tersentuh.

Sejak pertengahan dekade 70-an kongres Amerika secara bertahap mulai meningkatkan pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika. Namun, peningkatan ini tidak berjalan lancar karena situasi perang dingin masih menjadi alasan kuat presiden Amerika untuk mendominasi proses pembuatan kebijakan luar negeri. Pergeseran sesungguhnya baru terjadi sejak perang dingin berakhir.

Presiden juga menjabat sekaligus menjadi Panglima Angkatan Darat dan angkatan Laut Amerika Serikat yang mana dengan adanya kuasa tersebut, Presiden dapat menggunakan kekuatan militer dan mengumpulkan intelijen asing. Ketika dihadapkan pada situasi nyata, Presiden akan mengeluarkan opininya secara tertulis dan ia dapat memberikan remisi serta pengampunan hukuman untuk berbagai kasus pelanggaran yang melawan Amerika Serikat, kecuali dalam kasus pendakwaan.

Presiden dinyatakan oleh Konstitusi untuk bertindak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi militer, dan juga sekaligus menjadi kepala diplomat. Dalam kapasitas tersebut, Presiden bertanggung jawab atas

pertahanan militer dan kepentingan nasional negara, termasuk mengumpulkan pasukan militer AS serta menjalankan diplomasi seperti negosiasi perjanjian.

Lembaga eksekutif yang dipegang oleh Presiden memiliki hak untuk menolak menandatangani Undang-Undang. Presiden juga memiliki hak untuk memberitahu dan meminta legislasi dari Kongres, dan tentu saja sebagai Kepala Pemerintahan Presiden memiliki tugas untuk langsung berurusan dengan permasalahan atau isu-isu tentang luar negeri. Konstitusi memberikan Presiden kuasa untuk membuat perjanjian dan untuk menerima serta menunjuk Duta Besar. Kuasa ini memberikan kekuasaan otoritas kepada Presiden untuk melakukan kebijakan luar negeri. Presiden bebas untuk bernegosiasi mengenai perjanjian yang akan dibuat, namun perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh dua pertiga anggota Senat.<sup>2</sup>

Dalam era pasca perang dingin Amerika seperti kehilangan alasan untuk melancarkan peperangan dengan Uni Soviet yang telah runtuh menjadi Rusia. Hilangnya ancaman Uni Soviet ini membuat presiden Amerika tidak lagi memiliki legitimasi penuh terhadap dominasi proses pembuatan kebijakan luar negeri. Di masa ini kongres Amerika Serikat mulai meningkatkan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan luar negeri terutama dalam bidang militer.

## **2. Kongres**

Sebelum pecahnya perang dunia kedua, Presiden Amerika Serikat tidak dapat menjalankan kebijakan luar negeri tanpa adanya dukungan kongres terutama kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan perang. Di dalam konstitusi Amerika disebutkan bahwa kongres adalah badan yang paling berwenang untuk menyatakan perang (*Declaration of War*). Dengan demikian secara

---

<sup>2</sup> Avianda, Respati Lintang. 2017. *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Mesir pada Masa Pemerintahan Abdul Fattah Al Sisi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul.

konstitusional kongres memiliki otoritas dalam bidang politik luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Disamping itu, dukungan kongres sangat diperlukan oleh presiden apabila hendak mengirimkan pasukan militer ke luar negeri.

Pada dasarnya, Kongres terlibat dan dapat membuat kebijakan luar negeri melalui; *resolutions and policy statements, legislative directives, legislative pressure, legislative restrictions/funding denials, informal advice, and congressional oversight*.<sup>3</sup> Kongres memiliki peran strategis melalui komisi dan sub-komisi di dalam kongres. Komisi Hubungan Luar Negeri memainkan peran yang sangat besar dalam memainkan politik luar negeri Amerika Serikat. Komisi angkatan bersenjata serta sub komisi instalasi dan konstruksi militer berwenang menentukan anggaran yang diperlukan oleh institusi militer. Komisi-komisi dapat menambah, mengurangi, atau bahkan menghentikan anggaran yang diperlukan departemen luar negeri maupun departemen pertahanan.

Kongres juga memiliki wewenang untuk membuat undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk membatasi presiden dalam menjalankan dan membuat kebijakan luar negeri. Secara garis besar, peranan kongres adalah menerima, menolak, atau mengubah kebijakan luar negeri yang diusulkan oleh presiden. Oleh karena itu, kongres dengan sendirinya memiliki peran menentukan dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat.

Secara teknis, kongres ialah pelabuhan terakhir dari proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Setelah melalui banyak aktor seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, CIA, *executive branch*, Media Massa, dan kelompok kepentingan, Presiden kemudian akan membuat perumusan kebijakan luar negeri, kemudian proposal tersebut akan diajukan ke kongres. Maka kongres

---

<sup>3</sup> Cipto, *Op. Cit hlm 2*

adalah aktor selanjutnya yang akan memutuskan kebijakan mana yang akan diambil.<sup>4</sup>

Dalam kongres akan ada komisi-komisi yang terbagi dalam tiga komisi<sup>5</sup> yang fungsinya berhubungan dengan proses kebijakan luar negeri, tiga komisi tersebut antara lain:

- 1.) Komisi Otoritas yang berfungsi untuk mengkaji proposal yang diajukan eksekutif atau meninjau kembali program-program yang telah berjalan untuk dilanjutkan atau dihentikan.
- 2.) Komisi Apropriasi yang berfungsi untuk membiayai program pemerintah yang telah mendapat otoritas dari komisi otoritas.
- 3.) Komisi Kontrol yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas penggunaan uang dan legalisasi, dan perilaku anggota kongres

## **B. Badan Pendukung Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat**

### **1. Departemen Luar Negeri**

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat adalah salah satu departemen tertinggi yang berada langsung di bawah perintah presiden untuk mengelola urusan luar negeri. Departemen Luar Negeri bertugas sebagai perpanjangan tangan presiden dan menjadi perwakilan negara untuk bernegosiasi dengan negara lain dan organisasi internasional, mewakili warga dan kebijakan Amerika Serikat, mempromosikan hubungan dengan para pengambil keputusan di luar negeri, mempertahankan posisi negaranya di dunia internasional, memajukan investasi dan perdagangan Amerika Serikat, serta melindungi warga Amerika Serikat yang berada di

---

<sup>4</sup> Loka, Maya, Dwi. 2016. *Penolakan Amerika Serikat Meratifikasi Perjanjian Larangan Penggunaan Ranjau Antipersonil: Dari Clinton hingga Obama*. Universitas Gadjah mada: Yogyakarta.

<sup>5</sup> Loka, *Ibid*.

luar negeri dari perlakuan yang tidak manusiawi dan diskriminatif.

Semua kegiatan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat seperti perlawanan terhadap kejahatan internasional, program pelatihan militer, program bantuan luar negeri dan lainnya dibiayai oleh anggaran urusan luar negeri. Anggaran tersebut merupakan kunci untuk mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat yang selalu mempromosikan dan melindungi kepentingan warga negara Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri memiliki wewenang penuh dalam penggunaan anggaran luar negeri dan sumber daya lainnya.

Selain itu, peran utama Departemen Luar Negeri adalah memimpin koordinasi dalam mengembangkan serta melaksanakan kebijakan luar negeri, mengkoordinasi dan memimpin perwakilan Amerika Serikat di luar negeri, menyampaikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk organisasi internasional dan negara lain serta menjalankan misi diplomatik melalui kinsulat dan kedutaan Amerika Serikat di luar negeri, melakukan negosiasi dan menyimpulkan kesepakatan dan perjanjian pada isu-isu seperti perdagangan senjata nuklir, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan internasional yang dilakukan oleh Lembaga dan pejabat Amerika Serikat yang lain.

Departemen Luar Negeri diketuai oleh Menteri Luar Negeri yang dipilih sendiri oleh presiden namun tetap dengan pertimbangan dan saran dari senat. Peran Menteri Luar Negeri sangat penting yaitu sebagai penasihat presiden terkait isu-isu kebijakan luar negeri, memberikan informasi mengenai hubungan Amerika Serikat dengan negara asing lainnya kepada kongres dan warga Amerika Serikat. Oleh karenanya, Presiden dan

Menteri Luar Negeri bekerja sama untuk memberikan pertimbangan yang komprehensif pada berbagai masalah kebijakan luar negeri.<sup>6</sup>

## 2. CIA

*Central Intelligence Agency* atau CIA didirikan pada tahun 1947 bersamaan dengan penandatanganan *National Security Act* oleh Presiden Harry S. Truman. Peristiwa tersebut juga melahirkan *Director of Central Intelligence* (DCI) yang bertugas sebagai kepala dari komunitas intelijen Amerika Serikat.<sup>7</sup> Pada awalnya CIA menggantikan Office of Strategic Services (OSS) saat Perang Dunia II untuk mengatur aktivitas angkatan bersenjata AS yang bersifat rahasia dan berkaitan dengan perang. Pada tahun 1947, Presiden Truman melihat bahwa AS membutuhkan sebuah badan intelijen khusus dan menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional yang menjadi dasar pembentukan CIA.<sup>8</sup>

Peran CIA dalam proses perumusan kebijakan luar negeri yakni CIA bertanggung jawab atas pengumpulan dan analisis informasi intelijen dan mendistribusikannya kepada para pembuat kebijakan seperti Presiden, Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, serta Departemen Pertahanan. Selain itu, CIA melakukan tindakan operasi rahasia di luar negeri untuk memajukan kepentingan AS. CIA juga berfungsi sebagai penghubung intelijen antara Kongres, cabang eksekutif, dan komunitas intelijen. Informasi yang sudah dikumpulkan oleh CIA akan dianalisis dari berbagai sudut pandang dan mengkaitkannya dengan kepentingan AS. Analisis tersebut akan menjadi *President's Daily*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>7</sup> Central Intelligence Agency. 2006. About CIA. (<https://www.cia.gov/about-cia>, diakses 13 Januari 2018)

<sup>8</sup> Avianda, *Op. Cit.*, Hlm. 38.

Brief (PDB), dan laporan harian yang diterima oleh agen intelijen AS lainnya.<sup>9</sup>

Dalam mendukung perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, CIA bertugas untuk mengidentifikasi masalah dan berbagai isu yang bersangkutan dengan keamanan nasionalnya. Dalam beberapa kasus, CIA diarahkan untuk mempelajari isu yang berkaitan dengan terorisme atau bagaimana negara-negara yang memiliki senjata biologis atau kimia menyusun rencana untuk menggunakan senjata tersebut. Akan tetapi dalam kontribusinya untuk pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, CIA hanya ditugaskan untuk membuat laporan yang dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan kebijakan, bukan sebagai pemeran utama selayaknya Presiden dan Kongres dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri suatu negara sebagian besar didorong oleh kebijakan domestik termasuk jenis pemerintahan, kebijakan dan prioritas, perlakuan terhadap warga negaranya, hubungannya dengan negara tetangga, pendekatan budaya untuk resolusi konflik, dll. Variabel yang mempengaruhi proses kebijakan luar negeri adalah bentuk ideologi yang dianut suatu negara, dasar hukum negara (Konstitusi) beserta sistem politiknya, serta adanya institusi yang dibentuk secara khusus untuk membantu Presiden merumuskan kebijakannya. Ideologi Amerika yakni liberalisme memang tidak dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diusung secara langsung, namun mampu memberikan pengaruh lewat aktor yang berperan dalam membuat kebijakan tersebut seperti Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Kongres. Awalnya kebijakan luar negeri di Amerika Serikat tergantung pada partai mana yang sedang mendominasi pemerintahan, dimana dari kedua partai politik yakni Partai Demokrat dan Partai

---

<sup>9</sup> Avianda. *Ibid.*

Republik memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam kebijakan-kebijakan mereka. Ideologi yang dianut Presiden berasal dari salah satu partai tersebut akan memberikan pengaruh besar pada berbagai kebijakannya.<sup>10</sup>

### 3. Departemen Pertahanan

Department of Defence (DoD) bertanggung jawab menjalankan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat setelah kebijakan nasional atau kebijakan luar negeri dari presiden ditetapkan<sup>11</sup>, dalam Departemen Pertahanan terdapat tiga kategori angkatan bersenjata yakni angkatan darat, laut, dan udara bersama dengan beberapa agen yang memproduksi semua senjata dan perlengkapan unit militer ketika ada ancaman dari luar.

Departemen Pertahanan adalah agen tertua dan terbesar di AS. Misi khusus Departemen Pertahanan adalah memberikan perlengkapan militer yang diperlukan untuk mencegah perang sekaligus melindungi keamanan negara AS dengan menyediakan informasi yang akurat tentang organisasi, fungsi, operasi, serta kebijakan pertahanan. Departemen Pertahanan yang diwakili oleh Menteri Pertahanan memiliki tugas utama yakni menjadi asisten Presiden yang utama dalam segala urusan yang berhubungan dengan keamanan nasional.

Peran Departemen Pertahanan dalam memberikan bantuan asing dapat dianggap sebagai melayani tiga tujuan yakni menanggapi kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan pokok, membangun kemampuan dan kapasitas kekuatan militer, dan memperkuat kemampuan negara lain untuk menghadapi ancaman internal maupun eksternal melalui langkah-langkah pembangunan negara. Kongres mengembangkan peran Departemen Pertahanan

---

<sup>10</sup> Avianda, *Ibid.* Hlm. 39

<sup>11</sup> Saputera, Muhammad, Yuliansyah. 2015. *Pengaruh Cyber Security Strategy Amerika Serikat Menghadapi Ancaman Cyber Warfare.*

Jom FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Universitas Riau

secara perlahan melalui undang-undang dan legislasi tahunan. Peran Departemen Pertahanan juga mengurus anggaran urusan luar negeri yang berkaitan dengan bidang keamanan.

Dalam beberapa kasus, DoD berpartisipasi melayani tujuan institusional militer AS, memberikan kesempatan kepada tentara dan pelaut AS mendapatkan pelatihan militer, untuk komunikasi antar militer, dll.<sup>12</sup>

#### **4. Militer Amerika Serikat (AS)**

Yumitro (2008) menjelaskan bahwa Militer Amerika Serikat (AS) berada di bawah supremasi sipil yang diwujudkan dengan adanya Departemen Pertahanan. Departemen Pertahanan adalah departemen eksekutif dalam US Government yang dibentuk pada tahun 1949 berdasarkan amandemen terhadap National Security Act 1947 yang mengatur struktur pertahanan AS (*National Military Establishment*) dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan. National Security Act disusun dalam rangka mencegah dan mengurangi tumpang tindih wewenang dalam struktur pertahanan AS.<sup>13</sup>

Berdasarkan amandemen 1949, angkatan darat, laut, dan udara berubah menjadi Military Department yang berada di bawah Departemen Pertahanan. Secara umum, military department tersebut bertugas untuk mengorganisasi, melatih, dan melengkapi personil untuk berbagai misi baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan kepada Reorganizing Act 1958, Military Department tersebut dipisahkan dalam rantai komando operasional. Selanjutnya, rantai komando dari Presiden diserahkan kepada Menteri Pertahanan yang kemudian diteruskan kepada para Kepala Staf. Melalui Kepala Staf tersebut, perintah dari Presiden kemudian dilanjutkan pada pemimpin komando yang berada di

---

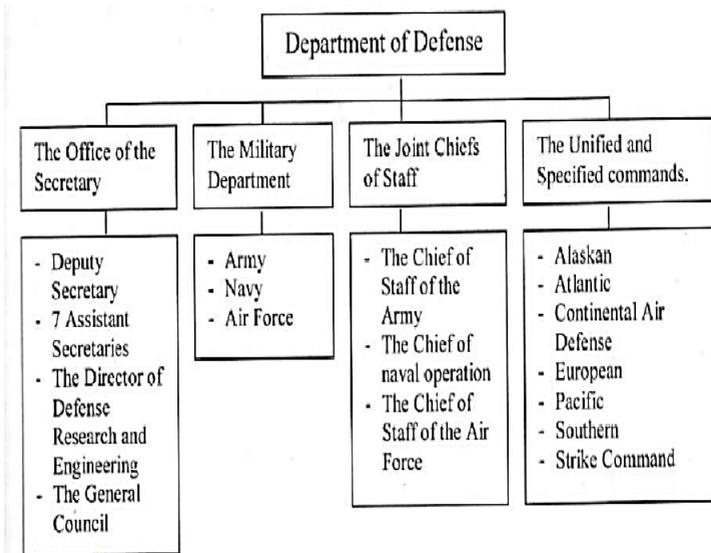
<sup>12</sup> Avianda, *Op. Cit.*, Hlm. 35

<sup>13</sup> Yumitro, Gonda. *Peran Militer dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat*. Jurnal Ilmiah Bestari Vol. 38/th.XXI Mei-Agustus 2008.

lapangan. Dengan demikian, maka struktur pertahanan AS sangat tersentralisasi dan hierarkis. Struktur organisasi dalam Departemen Pertahanan AS dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Adapun Military Department yang berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan AS adalah Department of the Army, Department of the Navy, dan the Department of the Air Force. Ketiga Military Department ini dibentuk berdasarkan National Security Act 1947. Ketiga Pimpinan dari Military Department tersebut diangkat langsung oleh Presiden dengan konfirmasi dari US Senate.

**Gambar 2.1:**  
**Struktur Organisasi Departemen Pertahanan Amerika Serikat**

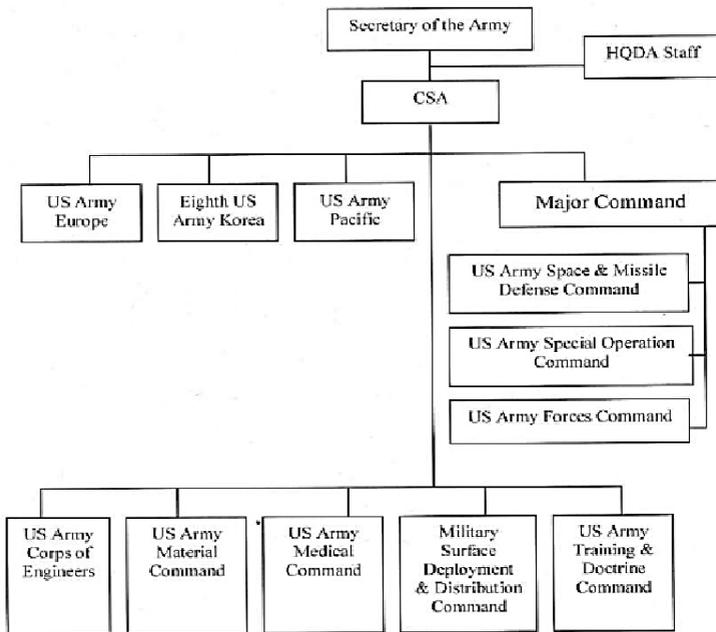


Pada umumnya, Department of the Army bertugas menjaga dan mengelola kedaulatan daratan Amerika Serikat. Adapun misi utamanya ialah *“to fight and win our Nation’s wars by providing prompt, sustained land dominance across the full range of military operations*

*and spectrum of conflict in support of combatant commanders.*

Berdasarkan tugas dan fungsinya, The Army dibedakan menjadi dua yaitu operational army yang melaksanakan tugas operasional lapangan, meliputi berbagai jenis kegiatan operasi militer di seluruh dunia yang dilakukan oleh prajurit, corps, divisi, brigade maupun battalion. Sedangkan institutional army melaksanakan tugas institusional meliputi penyediaan infrastruktur seperti peningkatan, pengembangan, dan pelatihan kesiapan prajurit untuk menghadapi perang melalui kegiatan pendidikan dan kepelatihan militer.

**Gambar 2.2:**  
**Struktur Organisasi Departemen of The Army**

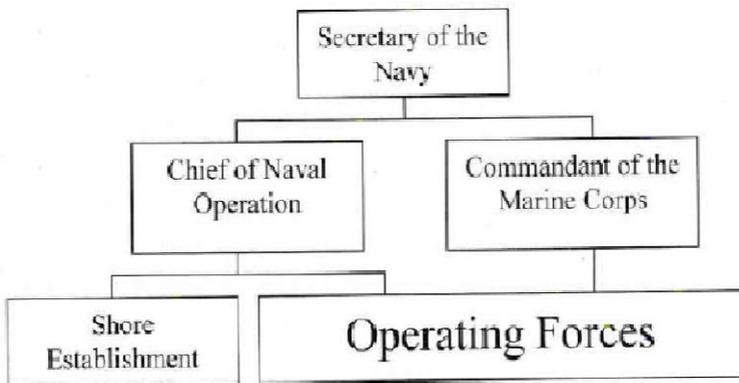


Selain itu, institutional army bertugas mempersiapkan *power projection platform* berupa analisis lapangan untuk mendukung perang. Baik

operational army maupun institutional army, keduanya saling mendukung. Tanpa institutional army maka operational army tidaklah berfungsi. Namun, tanpa adanya operational army, institutional army menjadi kehilangan tujuan.

Sedangkan Department of the Navy secara umum bertugas untuk menjaga dan mengelola kedaulatan laut AS. Misinya adalah *“to maintain, train and equip combat-ready Naval forces capable of winning wars, deterring aggression and maintaining freedom of the seas.”*. The Navy terdiri dari Executive Offices, the Operating Forces (Marine Corps, pasukan cadangan dan US Coast Guard) dan shore establishment. Struktur Organisasi the Navy dapat dilihat pada bagan 2.3.

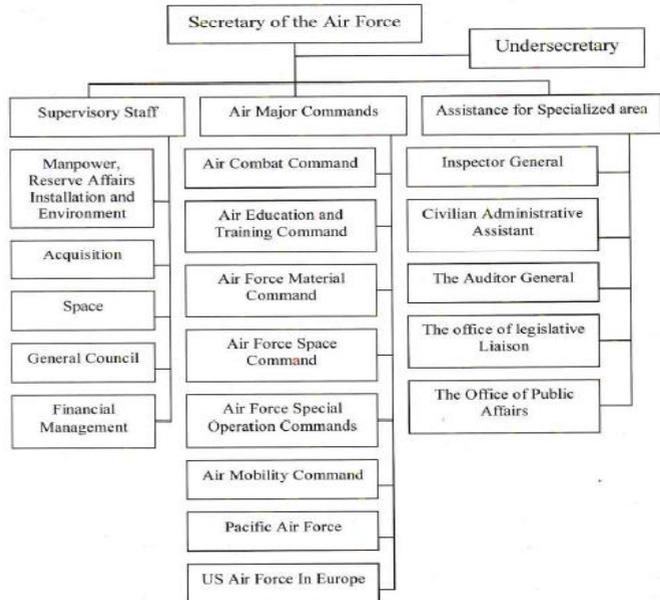
**Gambar 2.3:**  
**Struktur Organisasi Departemen of The Navy**



Sebagaimana dengan the Army, Department of the Navy juga terdiri dari dua jenis pasukan yakni pasukan aktif dan pasukan cadangan. Dalam keadaan damai, The Coast Guard bekerja dibawah koordinasi oleh

Departemen Transportasi dengan tugas utama menegakkan hukum laut dan properti AS di lautan.

**Gambar 2.4:**  
**Struktur Organisasi Departemen of the Air Force**



Kemudian, Department of the Air Force bertugas menjaga dan mengelola kedaulatan udara Amerika Serikat yang luasnya sebesar luas dari daratan dan perairan AS. Misi utama dari Air Force adalah “*to deliver sovereign options for the defense of the united stated of America and its global interests – to fly and flight in Air, Space, and Cyberspace*”.

Air Force bekerja berdasarkan kepada tiga nilai utama, yakni *integrity first, service before self, and excellence in all we do*. Sebagaimana dua military department sebelumnya, Air Force juga terdiri dari dua pasukan yakni pasukan aktif dan pasukan cadangan (Air

National Guard dan Air Force Reserve). Air National Guard dibentuk di masing-masing negara bagian dengan koordinasi dari masing-masing gubernur negara bagian. Struktur Department of the Air Force bisa dilihat dalam bagan 2.4.

### C. Pola Intervensi Amerika Serikat

Kebijakan Luar negeri Amerika Serikat terdiri dari empat macam pola. Pola-pola tersebut satu sama lain saling berbeda bahkan ada juga yang bertentangan. Hal ini terjadi karena satu sama lain secara periode berada pada tahap interval waktu yang cukup panjang. Dalam keilmuan, sejarah perkembangan konsep-konsep dan teori-teori hubungan internasional dapat hilang karena termakan oleh paradigma baru atau dengan kata lain persepsi terhadap persoalan dalam Hubungan Internasional sering mengalami anomali.

Pola pertama, adalah isolasionis, merupakan sikap yang dimunculkan oleh para pengambil keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Pola ini berlaku pada masa awal diterapkannya politik luar negeri yang selanjutnya menjadi kebijaksanaan. Alasan dasar dari kebijaksanaan ini adalah adanya politik imperialisme Eropa yang merasa besar (*great power*) terhadap negara-negara lemah di luar Eropa sendiri.<sup>14</sup>

Pola kedua, adalah ekspansi, pola ini bertolak belakang dengan pola pertama, isolasionis. Awal mula terjadinya suatu pergeseran dari isolasionis menjadi ekspansionis ini terjadi secara perlahan mengikuti arus berkembangnya budaya barat yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Amerika Serikat mencoba mengembangkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi politik domestiknya, yaitu keinginan untuk menguasai benua Amerika secara menyeluruh. Keinginan tersebut pada akhirnya dibuktikan melalui adanya perang Amerika Serikat-Meksiko.<sup>15</sup>

Pola ketiga adalah netral. Munculnya perang besar dalam sejarah abad ke-20 telah memberikan warna baru

---

<sup>14</sup> Farma, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Farma, *Ibid.*

dalam konstelasi perpolitikan di Amerika Serikat, terutama politik luar negerinya. Peperangan yang terjadi pada waktu yang mengkhawatirkan seluruh dunia, tidak mempengaruhi Amerika Serikat untuk melibatkan diri di dalam peperangan. Dalam rangka mengantisipasi, Amerika Serikat mengambil tindakan kebijaksanaan, yakni sikap netral yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan.

Pada perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat yang selanjutnya adalah intervensi, dimana kebijakan bersifat campur tangan dalam berbagai urusan, baik masalah internasional, masalah regional, ataupun masalah dalam negeri. Politik ini mengakibatkan peran Amerika Serikat semakin besar pada periode pasca perang dunia kedua, bahkan hingga saat sekarang ini. Politik intervensi ini dilaksanakan Amerika Serikat secara terus terang tanpa mengindahkan norma dalam negerinya, negara lain, dan peradilan yang berlaku dalam hubungan internasional.

Politik intervensi digunakan Amerika Serikat sebagai sarana untuk mencari keuntungan dalam bentuk yang riil. Setiap tindakan yang dilakukan harus bermanfaat bagi kepentingan nasionalnya. Sehingga, Amerika Serikat seringkali menggunakan jalan pintas dalam mengambil kebijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Jalan pintas ini pada umumnya tidak menggunakan prosedural peradilan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat dan internasional. Terkait hal ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang merupakan salah satu wahana yang dijadikan legitimasi oleh Amerika Serikat untuk melakukan apapun yang sesuai dengan kepentingannya.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering dibicarakan dalam lingkup ketegangan dialektik antara dua pola yang berlawanan: pragmatisme-realisme dan legalisme-moralisme. Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat hanya berputar antara politik riil dan moralisme. Esensi dari realisme ini adalah kepentingan

nasional yang terkait erat dengan keamanan nasional Amerika Serikat.<sup>16</sup>

Politik luar negeri Amerika Serikat di awal abad ke-21 dipandang cenderung lebih memperkuat peran hegemonik Amerika di dunia daripada sebelumnya. Banyak analisis politik luar negeri Amerika Serikat akan merujuk pada pembentukan the project for the new american century (PNAC) di tahun 1997 sebagai titik perubahan yang paling penting. Dibentuk oleh sejumlah tokoh neokonservatif berpengaruh dan para pendukung *military-industrial complex*, PNAC berusaha keras untuk merumuskan ‘politik luar negeri AS pasca-perang dingin yang diperbarui’.

‘Politik Luar Negeri yang Diperbarui’ ini ditujukan untuk mempertahankan dan memajukan supremasi Amerika Serikat di segala bidang dengan segala cara, dengan sebuah ‘imperium Amerika yang baru’ menjadi tujuan utamanya. Apa yang mereka inginkan adalah sebuah dunia yang unipolar, dimana AS “*imposes the rules but, because of its own self-evident goodness, is not necessarily bound by them*” dan boleh bertindak secara sepihak, jika tindakan sepihak itu dapat melayani kepentingan Amerika.<sup>17</sup>

## **1. Studi Kasus: Intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah**

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dapat dilihat melalui penjelasan di bawah ini. Amerika Serikat secara global memiliki kepentingan untuk menguasai Timur Tengah baik secara ekonomis, politis, maupun strategis, dan Amerika Serikat tidak ingin kepentingannya tersebut gagal.

Dengan pengaruh yang cukup besar, Amerika Serikat melalui Dewan Keamanan PBB telah

---

<sup>16</sup> Farma, *Ibid.* Hlm. 23.

<sup>17</sup> Yuliantoro, Nur. 2005. *Hegemoni Amerika Pasca 11/9: Menuju Sebuah ‘Imperium Amerika Baru’*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9, No. 1, Juli 2005, pp. 91-112. Universitas Gadjah Mada

mengeluarkan beberapa resolusi, baik dalam bentuk kecaman, pengerahan pasukan multi-nasional, blokade ekonomi, hingga persetujuan dalam penggunaan militer, yang kemudian semua resolusi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Untuk menjaga kelangsungan kepentingannya di Timur Tengah, Amerika Serikat berniat untuk menata ulang stabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut. Dengan salah satu cara yakni penyelesaian konflik Arab-Israel karena konflik ini ialah kunci pokok perdamaian dan stabilitas keamanan Timur Tengah. Kepentingan Amerika Serikat sendiri tidak terlepas dari kepentingan Sumber Daya Minyak yang dimiliki kawasan Timur Tengah.

Awalnya alasan keamanan dan strategis masih menjadi dasar ambisi Amerika Serikat untuk terlibat di kawasan Timur Tengah, namun setelah 30 tahun kemudian, nilai penting dari Timur Tengah menjadi faktor bagi Amerika Serikat yang sudah menjadi salah satu importir minyak terbesar di dunia.

Semakin bernilai pentingnya Timur Tengah dengan semakin tergantungnya negara-negara sekutu Amerika Serikat (Eropa Barat dan Jepang) terhadap minyak Timur Tengah, yaitu sekitar 80% dari kebutuhan minyak mereka. Krusialnya minyak bagi negara-negara industri tersebut menyebabkan mereka memusatkan perhatiannya untuk memperoleh konsesi dari negara-negara Timur Tengah.

Oleh karena itu, stabilitas Timur Tengah menjadi penting bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk memelihara dan menjamin lancarnya lalu lintas *supply* minyak dari kawasan tersebut dari gejolak-gejolak yang dapat mengancam kelangsungan kepentingan mereka, dan cara terbaik untuk menghindari ancaman tersebut yakni penyelesaian bagi terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah.